



Tata Kelola Pasar Tradisional Pasca Relokasi di Kabupaten Muaro Jambi

Sela Ulandari^{1*}, M. Yusuf², Azira Novia Rizal³

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

Email : selaulandari60@gmail.com^{1*}, myusuf@unja.ac.id², aziranoviarizal@unja.ac.id³

*Penulis Korespondensi: selaulandari60@gmail.com

Abstract. *Traditional markets are an important component of the people's economy and play a strategic role in supporting trading activities and community social life. The Government of Muaro Jambi Regency implemented a policy to relocate the Sengeti People's Market to reorganize and improve the quality of trading facilities so they become more orderly, feasible, and representative. However, after relocation, market utilization has not functioned optimally, and various management problems persist. This study aims to analyze traditional market governance after relocation in Muaro Jambi Regency, using the Sengeti People's Market as a case study. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation, involving informants from the Trade Division of the Office of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade, as well as market managers, traders, and community members. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that post-relocation governance has not been optimally implemented. Key issues include weak policy communication, mismatches between facilities and traders' needs, limited trader participation, and poor coordination among relevant agencies. The study highlights that successful market relocation depends not only on physical development but also on participatory, transparent, and sustainable governance, supported by stronger institutional coordination, increased trader involvement, and continuous evaluation.*

Keywords: *Governance; Market; Public Policy; Relocation; Traditional Market.*

Abstrak. Pasar tradisional merupakan komponen penting dalam perekonomian masyarakat dan memainkan peran strategis dalam mendukung kegiatan perdagangan dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menerapkan kebijakan relokasi Pasar Rakyat Sengeti untuk menata ulang dan meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan agar lebih tertata, layak, dan representatif. Namun, setelah relokasi, pemanfaatan pasar belum berfungsi optimal, dan berbagai masalah manajemen masih berlanjut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pasar tradisional pasca relokasi di Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan Pasar Rakyat Sengeti sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang melibatkan informan dari Divisi Perdagangan Kantor Koperasi, UKM, Industri, dan Perdagangan, serta pengelola pasar, pedagang, dan anggota masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan teknik kualitatif deskriptif, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pasca relokasi belum terlaksana secara optimal. Isu-isu utama meliputi komunikasi kebijakan yang lemah, ketidaksesuaian antara fasilitas dan kebutuhan pedagang, partisipasi pedagang yang terbatas, dan koordinasi yang buruk antar lembaga terkait. Studi ini menyoroti bahwa relokasi pasar yang sukses tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik tetapi juga pada tata kelola yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, yang didukung oleh koordinasi kelembagaan yang lebih kuat, peningkatan keterlibatan pedagang, dan evaluasi berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Pasar; Pasar Tradisional; Relokasi; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan salah satu institusi ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat interaksi masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta pelestarian nilai budaya lokal. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola serta menata pasar tradisional agar mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan dan persaingan ekonomi modern.(Kamilia Nur Afita, 2024)

Namun demikian, pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama terkait kondisi fisik bangunan, sanitasi, tata ruang, serta lemahnya sistem pengelolaan.(Junaidi et al., 2019). Kondisi pasar yang kumuh, tidak tertata, dan minim fasilitas berdampak pada menurunnya daya saing pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern yang menawarkan kenyamanan dan pengelolaan yang lebih profesional. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan, salah satunya melalui program relokasi dan revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan keberlanjutan ekonomi lokal.(Wulandari Nur Utami & Ade Yunita Mafruhah, 2023)

Pengelolaan pasar tradisional merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program, seperti revitalisasi dan relokasi pasar. Intervensi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional agar lebih layak dan berdaya saing. Langkah-langkah strategis ini juga didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta berbagai Peraturan Daerah yang spesifik di tingkat lokal (Djakiman & Kotarumalos, 2023). Pengelolaan pasar tradisional yang efektif menjadi sangat vital. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional agar tidak kalah dengan pasar modern, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan para pedagang dan masyarakat yang secara langsung bergantung pada roda perekonomian di dalamnya. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat (Mokalu *et al.*, 2021).

Berdasarkan data pasar tradisional di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki jumlah pasar terbanyak dengan 29 lokasi. Diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 11 pasar, serta Kabupaten Kerinci dan Bungo yang masing-masing memiliki 10 pasar. Jumlah pasar tradisional di beberapa kabupaten/kota lainnya hampir merata. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Sarolangun, dan Merangin masing-masing memiliki 9 pasar. Selanjutnya, Kabupaten Tebo memiliki 8 pasar dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki 7 pasar. Kota Sungai Penuh menjadi daerah dengan jumlah pasar tradisional paling sedikit, yaitu hanya dua pasar. Pemerintah Kota Jambi secara khusus memanfaatkan beberapa pasar tradisional ini untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi (Sihaloho & Sihombing, 2023)

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki peran strategis sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023, tercatat sebanyak 3.831 pedagang aktif yang tersebar di 40 pasar umum dengan dukungan 610 los dan 338 kios. Data ini menunjukkan bahwa pasar tradisional menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. (Ginting & Hanani, 2024).

Tingginya intensitas aktivitas perdagangan belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas tata kelola pasar yang memadai, sehingga masih ditemukan berbagai permasalahan struktural dan manajerial dalam pengelolaannya. Meskipun distribusi pasar tradisional di Provinsi Jambi relatif merata di berbagai kabupaten/kota, setiap daerah memiliki dinamika dan tantangan pengelolaan yang berbeda-beda. Kota Jambi dengan jumlah pasar terbanyak berfungsi sebagai pusat perdagangan utama, sedangkan kabupaten lain mengandalkan pasar tradisional sebagai penopang ekonomi lokal masyarakat. (Wulandari Nur Utami & Ade Yunita Mafruhah, 2023).

Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah Kabupaten Muaro Jambi, dengan kedudukannya sebagai daerah penopang ibu kota provinsi serta memiliki pasar rakyat yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menegaskan bahwa pasar tradisional di Muaro Jambi tidak hanya menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. (Permana *et al.*, 2024).

Salah satu kebijakan penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi adalah relokasi Pasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai kawasan untuk aktivitas jual beli barang yang melibatkan lebih dari satu penjual. (Mardiansyah *et al.*, 2020).

Kawasan ini dapat berupa pusat perbelanjaan, mal, pasar tradisional, pertokoan, alun-alun, atau tempat dengan sebutan lainnya. Pasar ini memiliki nilai historis dan ekonomis yang tinggi karena telah menjadi pusat perdagangan masyarakat sejak tahun 1962 dan terletak di ibu kota kabupaten. Relokasi dan pembangunan kembali pasar dilakukan sejak tahun 2014 dan dilanjutkan melalui Dana Alokasi Khusus hingga akhirnya diresmikan pada tahun 2021. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih tertib, layak, dan representatif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, realitas pasca relokasi menunjukkan bahwa pemanfaatan pasar belum berjalan optimal, ditandai dengan rendahnya tingkat hunian kios, kerusakan fasilitas bangunan, serta minimnya aktivitas perdagangan di lokasi baru. (Rakinaung *et al.*, 2019)

Pemerintah daerah melakukan revitalisasi sekaligus relokasi pasar pada tahun 2014 dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih layak dan representatif. Proses pembangunan kembali dilanjutkan melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga pada tahun 2021 pasar semi modern tersebut diresmikan sebagai Pasar Rakyat Sengeti oleh Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busroh. Kebijakan pembangunan pasar ini berasal dari usulan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. Namun, pelaksanaannya dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena ketiadaan tim teknis di dinas pengusul. Pergeseran tanggung jawab ini menunjukkan adanya dinamika koordinasi antarperangkat daerah dalam implementasi kebijakan publik. Pembangunan pasar tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, serta memperkuat aktivitas perdagangan masyarakat. (Anggita Dahnelia, M. Kendry Widiyanto, 2025)

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Pasar Rakyat Sengeti belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil observasi memperlihatkan bahwa kondisi fisik bangunan masih belum memenuhi standar kenyamanan, seperti kerusakan pada dinding, plafon, dan lantai. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang enggan untuk menempati lokasi baru. Selain itu, minimnya pelibatan pedagang dalam proses perencanaan serta ketidaksesuaian fasilitas dengan kebutuhan operasional turut memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. (Novianti et al., 2023). Situasi tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat mengenai efektivitas pembangunan pasar, termasuk kekhawatiran terkait manfaat yang belum dirasakan meskipun dana publik sudah dilakukan. Persepsi masyarakat penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan pasar dan legitimasi kebijakan pemerintah. Ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan kondisi pemanfaatan pasar saat ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang perlu dikaji secara mendalam. (Ronzon et al., 2025)

Berbagai penelitian terdahulu mengenai relokasi dan pengelolaan pasar tradisional menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan sering disebabkan oleh lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi pedagang, ketidaksesuaian fasilitas dengan kebutuhan pengguna, serta kurangnya koordinasi antarinstansi pelaksana. (Wibowo, 2021). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan relokasi pasar tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pasca relokasi, termasuk aspek manajerial, sosial, dan kelembagaan. Namun demikian, sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan relokasi, sementara kajian yang secara

spesifik mengulas tata kelola pasar tradisional pasca relokasi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, masih sangat terbatas. (Kamilia Nur Afita, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan antara tujuan ideal kebijakan relokasi pasar dengan realitas pengelolaan pasar setelah relokasi dilakukan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis relokasi sebagai kebijakan, tetapi juga menyoroti tata kelola pasar tradisional pasca relokasi, dengan menempatkan Pasar Rakyat Sengeti sebagai studi kasus. Fokus ini penting karena keberhasilan relokasi pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana pasar dikelola secara berkelanjutan, diterima oleh pedagang, dan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi baru.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat besarnya alokasi anggaran publik yang telah digunakan dalam pembangunan Pasar Rakyat Sengeti, sementara manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh pedagang dan masyarakat. Tanpa evaluasi tata kelola yang komprehensif, kebijakan relokasi berpotensi menimbulkan inefisiensi, penurunan kepercayaan publik, serta kegagalan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kajian akademik yang mendalam dan berbasis data empiris sangat dibutuhkan sebagai dasar perbaikan kebijakan pengelolaan pasar tradisional di tingkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola pasar tradisional pasca relokasi di Kabupaten Muaro Jambi, dengan fokus pada Pasar Rakyat Sengeti, guna memahami sejauh mana kebijakan relokasi mampu mewujudkan pasar yang tertib, berfungsi, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tata kelola dan implementasi kebijakan publik, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional pasca relokasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Kebijakan

Kajian teoritis penelitian ini bertumpu pada konsep kebijakan publik dan implementasinya dalam konteks tata kelola sektor ekonomi kerakyatan. Kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menjawab persoalan publik serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pemerintahan daerah, kebijakan publik menjadi instrumen strategis untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan publik daerah yang berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta penyediaan pelayanan publik di bidang perdagangan.(Kuncoro & Apriliyanti, 2024)

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Implementasi tidak sekadar dimaknai sebagai pelaksanaan administratif, tetapi sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan kepentingan. Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun nonpemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Pressman dan Wildavsky menegaskan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan kebijakan dan kemampuan organisasi pelaksana dalam mewujudkannya. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang secara baik sekalipun dapat mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang efektif.

Implementasi Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antarunit pelaksana. Teori ini digunakan untuk menjelaskan berbagai hambatan implementasi kebijakan relokasi dan tata kelola pasar tradisional yang sering kali muncul akibat lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi birokrasi yang tidak efektif.(Anggita Dahnelia, M. Kendry Widianyanto, 2025)

Teori Implementasi Kebijakan Jan Merse

Penelitian ini secara khusus menggunakan teori implementasi kebijakan Jan Merse sebagai landasan analitis utama. Teori ini menekankan empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Faktor informasi berkaitan dengan proses penyampaian kebijakan kepada kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Dalam konteks relokasi dan pengelolaan pasar tradisional, informasi mencakup sosialisasi mengenai tujuan relokasi, manfaat pasar baru, aturan teknis pengelolaan, serta hak dan kewajiban pedagang. Informasi yang tidak memadai berpotensi menimbulkan resistensi dan rendahnya tingkat pemanfaatan pasar pasca relokasi.(Dewi, 2015)

Informasi

Dalam implementasi kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Informasi merupakan unsur fundamental karena menjadi dasar bagi kelompok sasaran dalam memahami tujuan, mekanisme, serta dampak kebijakan yang diterapkan. Tanpa informasi yang memadai, kebijakan berpotensi disalahpahami sehingga menimbulkan resistensi, ketidakpatuhan, atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Isi kebijakan

Merujuk pada substansi kebijakan yang mencerminkan tujuan, sasaran, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan relokasi pasar yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pedagang, aksesibilitas lokasi, dan kelayakan fasilitas cenderung tidak efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isi kebijakan harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi pasar tradisional agar mampu mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi pasca relokasi.

Dukungan masyarakat

Merupakan faktor penting yang menentukan legitimasi dan keberterimaan kebijakan. Dukungan ini tercermin dari tingkat partisipasi dan penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam kebijakan relokasi pasar tradisional, pedagang menjadi aktor utama yang menentukan hidup atau tidaknya pasar pasca relokasi. Tanpa dukungan dan keterlibatan pedagang, kebijakan relokasi berpotensi menimbulkan konflik, penolakan, serta rendahnya tingkat hunian pasar baru. Oleh karena itu, dukungan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola pasar tradisional.

Pembagian potensi

Berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya, kewenangan, serta peluang ekonomi secara adil di antara para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan pasar tradisional pasca relokasi, pembagian potensi mencakup pemerataan distribusi kios atau los, aksesibilitas lokasi pasar, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pembagian potensi yang tidak proporsional dapat memicu kecemburuan sosial dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga berpijak pada konsep tata kelola (governance). Tata kelola dipahami sebagai proses pengelolaan sumber daya publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lain secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks pasar tradisional, tata kelola mencakup pengaturan kelembagaan, mekanisme pengelolaan, pengawasan, serta keterlibatan pedagang dan

masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi pasar. Tata kelola pasar yang baik tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa tata kelola pasar tradisional pasca relokasi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan. Kejelasan informasi, kesesuaian isi kebijakan, tingkat dukungan masyarakat, serta keadilan dalam pembagian potensi menjadi faktor kunci yang menentukan keberfungsian pasar setelah relokasi. Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa semakin baik kualitas keempat faktor tersebut, semakin efektif pula tata kelola pasar tradisional pasca relokasi. Asumsi ini menjadi landasan analitis dalam mengkaji kondisi pengelolaan Pasar Rakyat Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses tata kelola pasar tradisional pasca relokasi, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan dan dinamika yang terjadi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual tata kelola Pasar Tradisional pasca relokasi di Kabupaten Muaro Jambi secara sistematis dan objektif berdasarkan data lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Rakyat Sengeti, berlokasi di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Alasan melakukan penelitian di tempat ini karena merupakan pasar utama di ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, yang memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Jenis Data

Data Primer: merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung serta memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola pasar tradisional pasca relokasi di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Pasar Rakyat Sengeti. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara detail mengenai pengalaman, pandangan, serta persepsi informan terhadap implementasi kebijakan relokasi dan pengelolaan pasar pasca relokasi. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi fisik

pasar, aktivitas perdagangan, serta interaksi antara pedagang, pengelola, dan masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami konteks penelitian secara komprehensif. Dengan demikian, sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, laporan pengelolaan pasar, artikel jurnal, serta sumber informasi lain yang diperoleh melalui media daring. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis penelitian, memberikan landasan teoritis, serta mendukung interpretasi terhadap temuan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara: dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan secara purposive, yaitu pejabat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, pengelola pasar, pedagang pasar, serta masyarakat atau pembeli. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan relokasi, mekanisme komunikasi kebijakan, tingkat dukungan pedagang, serta dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan pasar.

Observasi: dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Pasar Rakyat Sengeti, untuk mengamati kondisi fisik pasar, aktivitas perdagangan, penataan pedagang, fasilitas pasar, serta interaksi antaraktor pasca relokasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan sekaligus memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara.

Dokumentasi: digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, foto, serta peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan relokasi dan pengelolaan pasar. Data dokumentasi berfungsi memperkuat temuan penelitian dan membantu peneliti memahami konteks kebijakan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antarfenomena. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Hasil triangulasi menunjukkan adanya konsistensi informasi antar sumber, sehingga data dinilai valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Rakyat Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai pasar tradisional hasil relokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu penelitian lapangan selama kurang lebih dua bulan, melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, pengelola Pasar Rakyat Sengeti, pedagang pasar, serta pembeli atau masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif untuk menggambarkan secara komprehensif tata kelola pasar tradisional pasca relokasi.

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pasar tradisional pascarelokasi di Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial, persepsi, serta dinamika kebijakan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Observasi lapangan dilakukan secara langsung di kawasan Pasar Rakyat Sengeti untuk mengamati kondisi fisik pasar, tingkat pemanfaatan kios dan los, pola aktivitas perdagangan, serta interaksi antara pedagang, pengelola pasar, dan pengunjung. Observasi ini penting untuk menangkap kondisi empiris pascarelokasi yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui data administratif. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses relokasi dan pengelolaan pasar. Informan tersebut meliputi pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, pengelola Pasar Rakyat Sengeti, serta pedagang pasar sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan relokasi. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti

kebijakan relokasi pasar, data pedagang, serta laporan pengelolaan pasar. Studi dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu September hingga Oktober 2025. Lokasi penelitian difokuskan di Pasar Rakyat Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan objek utama relokasi pasar tradisional di wilayah tersebut.

Hasil Analisis Tata Kelola Pasar Tradisional Pascarelokasi

Penataan Fisik Pasar dan Tingkat Pemanfaatan Fasilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pascarelokasi, Pasar Rakyat Sengeti mengalami perubahan signifikan dari sisi penataan fisik. Pasar baru dibangun dengan struktur yang lebih teratur, pembagian kios dan los yang jelas, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti drainase, area parkir, dan sarana sanitasi. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pasar tradisional agar lebih tertib dan layak.

Meskipun demikian, penataan fisik yang relatif memadai belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan fasilitas secara optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat kios dan los yang tidak ditempati oleh pedagang. Beberapa pedagang memilih untuk tetap berjualan di lokasi lama atau di luar area pasar resmi karena alasan strategis dan pertimbangan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tata kelola pasar tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan dan pola aktivitas pedagang. Tingkat pemanfaatan kios dan los yang belum optimal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan pembangunan pasar dengan realitas penggunaan di lapangan. Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian pedagang merasa ukuran los tidak sesuai dengan jenis dagangan, khususnya bagi pedagang komoditas basah yang membutuhkan ruang lebih luas dan fleksibel.

Implementasi Kebijakan Relokasi dan Efektivitas Komunikasi Kebijakan

Dari aspek implementasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan relokasi pasar melalui tahapan administratif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi perencanaan pembangunan pasar, pendataan pedagang, hingga pelaksanaan sosialisasi kebijakan relokasi. Secara formal, kebijakan relokasi telah dijalankan oleh instansi yang berwenang.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek komunikasi kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pedagang belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat relokasi pasar. Pedagang cenderung menilai kebijakan relokasi hanya sebagai pemindahan lokasi tanpa disertai jaminan peningkatan

pendapatan atau jumlah pembeli. Persepsi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan relokasi. Dalam konteks tata kelola publik, komunikasi kebijakan memiliki peran strategis dalam menjembatani tujuan pemerintah dengan kepentingan kelompok sasaran. Ketika komunikasi kebijakan tidak disampaikan secara jelas, intensif, dan berkelanjutan, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami resistensi. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi tata kelola pasar pascarelokasi.

Partisipasi Pedagang dalam Tata Kelola Pasar Pascarelokasi

Partisipasi pedagang merupakan elemen penting dalam tata kelola pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pedagang dalam proses relokasi dan pengelolaan pasar masih relatif rendah. Pedagang umumnya hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi kebijakan, sementara pada tahap perencanaan desain pasar dan penentuan kebutuhan fasilitas, peran pedagang masih terbatas. Minimnya pelibatan pedagang berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap pasar baru. Hal ini tercermin dari sikap pedagang yang kurang antusias menempati kios atau los yang telah disediakan. Dalam perspektif tata kelola, rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan masih bersifat top-down. Padahal, partisipasi aktif pemangku kepentingan, khususnya pedagang, dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mendorong keberlanjutan pengelolaan pasar.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Konsep Tata Kelola Pasar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pasar tradisional pascarelokasi di Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance. Prinsip partisipasi, efektivitas, dan responsivitas masih belum terimplementasi secara optimal. Secara konseptual, tata kelola pasar menuntut adanya sinergi antara pemerintah sebagai regulator, pengelola pasar sebagai pelaksana teknis, dan pedagang sebagai pengguna utama fasilitas pasar. Dominasi pendekatan fisik dan administratif dalam relokasi pasar menunjukkan bahwa kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek infrastruktur, sementara aspek sosial dan ekonomi pedagang belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, tujuan relokasi untuk menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan belum tercapai secara maksimal.

Kesesuaian dan Pertentangan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa relokasi pasar tradisional sering kali menghadapi resistensi pedagang apabila tidak disertai dengan pelibatan aktif dan komunikasi kebijakan yang efektif. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian fasilitas pasar dengan kebutuhan pedagang merupakan faktor utama rendahnya tingkat hunian kios pascarelokasi. Namun demikian,

penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan beberapa studi yang menyimpulkan bahwa relokasi pasar dapat berhasil apabila disertai dengan penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Dalam konteks Kabupaten Muaro Jambi, pengawasan dan penegakan aturan terhadap pedagang yang berjualan di luar area pasar belum dilakukan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas tata kelola pasar pascarelokasi.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola pasar tradisional merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan partisipatif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pasar tradisional menjadi prasyarat penting untuk keberhasilan kebijakan relokasi.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pasar pascarelokasi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan, memperluas partisipasi pedagang dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan pasar, serta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan pasar, memperkuat keberlanjutan ekonomi pedagang, serta mewujudkan tata kelola pasar tradisional yang lebih efektif dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pasar tradisional pascarelokasi di Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Relokasi Pasar Rakyat Sengeti telah berhasil dilaksanakan dari sisi pembangunan fisik dan penataan infrastruktur pasar, namun belum diikuti dengan tingkat pemanfaatan fasilitas yang maksimal oleh pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan relokasi untuk menciptakan pasar yang tertib, teratur, dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai kendala dalam tahap implementasi. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan partisipasi pedagang dalam proses pengelolaan, serta ketidaksesuaian sebagian fasilitas pasar dengan kebutuhan operasional pedagang.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tata kelola pasar pascarelokasi masih cenderung berorientasi pada pendekatan administratif dan fisik, sementara aspek sosial dan

ekonomi pedagang belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan relokasi relatif rendah dan masih ditemukan aktivitas perdagangan di luar area pasar resmi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan relokasi pasar tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang mencakup partisipasi, efektivitas, dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Kesimpulan ini berlaku dalam konteks Pasar Rakyat Sengeti dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi memperkuat strategi tata kelola pasar pascarelokasi dengan meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan kepada pedagang secara berkelanjutan dan dialogis. Pelibatan pedagang secara aktif dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pengelolaan pasar perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap kebijakan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fasilitas pasar dengan kebutuhan pedagang serta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten agar aktivitas perdagangan terpusat di lokasi pasar yang telah disediakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu penelitian dan fokus lokasi yang hanya pada satu pasar tradisional pascarelokasi, sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh tata kelola pasar tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara kuantitatif dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang dan jumlah pengunjung pasar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, memperluas lokasi penelitian, serta menganalisis dampak ekonomi relokasi pasar secara lebih terukur guna memperkaya pemahaman mengenai efektivitas kebijakan relokasi pasar tradisional.

DAFTAR REFERENSI

- Anggita Dahnelia, & Widiyanto, M. K. H. I. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat di Kota Surabaya. 5(01), 194–207.
- Dewi, N. M. (2015). Resistensi pedagang terhadap implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru Sidoarjo. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 126–136.
- Djakiman, F. R., & Kotarumalos, A. F. (2023). Membangun pasar tradisional yang berdaya dan tertata: Studi kebijakan penataan Pasar Mardika Kota Ambon. *Populis*, 18(1), 16–31. <https://doi.org/10.30598/populis.18.1.16-31>

- Ginting, R. L. E. B., & Hanani, R. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 315–340.
- Junaidi, M., Ramayanto, R., & Nurlailatul, N. (2019). Dampak relokasi pasar terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang Pasar Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.659>
- Kamilia Nur Afita. (2024). Implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 161–171. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.464>
- Kuncoro, D., & Apriliyanti, R. (2024). Analisis implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 10(1), 68–80. <https://doi.org/10.52447/gov.v10i1.7923>
- Mardiansyah, A., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2020). Tata kelola pemerintah dalam relokasi Pasar Kayu Bulan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34847>
- Novianti, S. B. N., Suprastiyo, A., & Kasiami, S. (2023). Public values kebijakan relokasi Pasar Kota Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2084–2094. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5955>
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah daerah dalam dinamika perekonomian masyarakat: Perspektif hukum dan sosiologi. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 1–28. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>
- Rakinaung, M., Kimbal, M., Egeten, M., & Pas, R. (2019). Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26254>
- Ronzon, T., Gurria, P., Carus, M., Cingiz, K., El-Meligi, A., Hark, N., Iost, S., M'barek, R., Philippidis, G., van Leeuwen, M., Wesseler, J., Medina-Lozano, I., Grimplet, J., Díaz, A., Tejedor-Calvo, E., Marco, P., Fischer, M., Creydt, M., Sánchez-Hernández, E., & Miras Ávalos, J. M. (2025). Analisis peran pasar induk dalam mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi lokal di Pasar Ibu, Payakumbuh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Sihaloho, R., & Sihombing, S. (2023). Pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 2 Siantar T.A. 2022/2023. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.385>
- Wibowo, N. M. (2021). Efektivitas program relokasi pasar dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 15(1), 133–158.
- Wulandari Nur Utami, & Mafruhat, A. Y. (2023). Dampak program revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan para pedagang di Pasar Pelita Kota Sukabumi. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(2), 386–391. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i2.8380>